

Peran Dinas Sosial dalam penanganan lansia terlantar di Kota Padang

Septyla Dwi Putri, *Rita Anggraini, Isnarmi Moeis, Al Rafni

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: *Rita Anggraini

E-mail: angrainirita15@gmail.com

Abstract

This study is motivated by the increasing issue of neglected elderly who require serious attention from the government, particularly through the Social Service Office. The purpose of this study is to analyze the role of the Social Service of Padang City in handling neglected elderly and to identify the inhabiting factors encountered. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation involving informants from the Social Service, community social workers, and the public. The results show that the Social Service has carried out multiple roles, including implementer, assessor, administrative facilitator, cross-sector coordinator, mediator, service provider, referral agent, social protector, and evaluator. However, these roles have not been fully optimized due to several obstacles such as the influx of elderly from outside regions, low family responsibility, low community awareness, budget constraints, internal conditions of the elderly, and socio-economic factors. Therefore, more proactive, integrated, and sustainable efforts are needed to improve the welfare of neglected elderly.

Article History

Received: 22 April 2026

Accepted: 22 May 2026

Published: 09 June 2026

Keywords:

neglected elderly, role of social services, social welfare, social services



PENDAHULUAN

Permasalahan lanjut usia (lansia) merupakan salah satu isu sosial yang semakin mendapat perhatian seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk lansia di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024), jumlah lansia terus mengalami peningkatan sebagai akibat dari meningkatnya angka harapan hidup dan perubahan struktur demografi penduduk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sedang memasuki era penduduk menua (*ageing population*) yang menuntut adanya perhatian khusus terhadap kesejahteraan lansia. Seiring bertambahnya usia, lansia mengalami berbagai perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri (Rijanta et al; 2022).

Peningkatan jumlah lansia tidak hanya membawa dampak positif berupa meningkatnya usia harapan hidup masyarakat, tetapi juga memunculkan berbagai permasalahan sosial, salah satunya adalah meningkatnya jumlah lansia terlantar. Lansia terlantar merupakan lansia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak, baik kebutuhan fisik, ekonomi, kesehatan maupun sosial, serta tidak memiliki keluarga atau pihak lain yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidupnya (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia). Kondisi keterlantaran tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kemiskinan, menurunnya fungsi fisik dan kesehatan, lemahnya dukungan keluarga, hingga terbatasnya akses terhadap pelayanan sosial.

Permasalahan lansia terlantar menjadi persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis akibat proses penuaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi yang melingkupinya. Menurut Nugroho dan Abikusno (2013), lansia yang mengalami penurunan fungsi tubuh cenderung membutuhkan dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dalam kenyataannya, tidak semua keluarga memiliki kemampuan maupun kesediaan untuk memberikan perawatan dan perlindungan kepada anggota keluarga yang telah lanjut usia. Akibatnya, sebagian lansia mengalami pengabaian, kesulitan ekonomi, bahkan kehilangan akses terhadap pelayanan dasar yang layak.

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada lansia terlantar. Salah satu instansi yang memiliki peran penting dalam penanganan permasalahan tersebut adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial sebagai lembaga pemerintah daerah bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi berbagai program kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk lansia terlantar (Rahmadani et al., 2016). Melalui berbagai program dan layanan sosial, Dinas Sosial berupaya memenuhi kebutuhan dasar lansia serta memberikan perlindungan agar mereka dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Peran Dinas Sosial dalam penanganan lansia terlantar dapat dilihat melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti penjangkauan, pendataan, asesmen, pemberian bantuan sosial, fasilitasi pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Menurut Willar et al. (2021) mengatakan peran merupakan seperangkat tindakan yang dijalankan oleh individu maupun lembaga sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya dalam struktur sosial. Sementara itu, Syarbani (2009:204) menjelaskan bahwa peran berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang melekat pada suatu status. Dalam konteks ini, Dinas Sosial memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi-fungsi pelayanan sosial secara optimal guna menangani permasalahan lansia terlantar.

Selain itu, teori penuaan (*aging theory*) menjelaskan bahwa lansia mengalami berbagai perubahan yang menyebabkan meningkatnya ketergantungan terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Penurunan kemampuan fisik, kesehatan, dan fungsi sosial dapat mengurangi kemampuan lansia dalam memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri (Nugroho, 2008). Oleh karena itu, dukungan dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan lansia. Apabila fungsi-fungsi dukungan tersebut tidak berjalan dengan baik, maka risiko keterlantaran pada lansia akan semakin meningkat.

Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang diperoleh di lapangan, masih ditemukan lansia terlantar di Kota Padang yang membutuhkan penanganan dan pelayanan sosial dari pemerintah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan lansia terlantar masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan keluarga, kesulitan pendataan, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal dapat memengaruhi efektivitas penanganan lansia terlantar. Oleh karena itu, diperlukan peran yang lebih aktif dan berkelanjutan dari Dinas Sosial dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penanganan lansia terlantar dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensional, seperti kemiskinan, rendahnya tanggung jawab keluarga, lemahnya dukungan sosial, serta keterbatasan pelayanan sosial yang tersedia. Penelitian-penelitian tersebut juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada lansia terlantar. Namun demikian, setiap daerah memiliki kondisi sosial, karakteristik masyarakat, serta tantangan yang berbeda dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial sehingga diperlukan penelitian yang lebih spesifik dan kontekstual sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Walaupun penelitian mengenai lansia terlantar telah banyak dilakukan, masih diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai bagaimana peran Dinas Sosial dalam menangani lansia terlantar serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas tersebut di tingkat daerah. Penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya mengkaji bentuk-bentuk peran yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Padang, tetapi juga mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses penanganan lansia terlantar, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada peran Dinas Sosial Kota Padang dalam penanganan lansia terlantar serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Dinas Sosial Kota Padang dalam menangani lansia terlantar dan mengidentifikasi berbagai faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta kesejahteraan lansia terlantar di Kota Padang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam fenomena sosial yang terjadi, khususnya terkait peran Dinas Sosial dalam penanganan lansia terlantar. Metode yang digunakan adalah studi kasus, dengan fokus pada Dinas Sosial Kota Padang sebagai lokasi penelitian. Subjek penelitian terdiri dari informan kunci seperti pihak Dinas Sosial, Pekerja Sosial masyarakat (PSM), aparat kelurahan, serta masyarakat yang mengetahui kondisi lansia terlantar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang komprehensif.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model analisis interaktif, di mana data analisis secara terus-menerus sejak awal penelitian hingga akhir. Pemilihan metode kualitatif deskriptif ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memahami secara mendalam peran, proses, serta faktor penghambat dalam penanganan lansia terlantar, sehingga menghasilkan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan kondisi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Sosial Kota Padang dalam penanganan lansia terlantar

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti, Dinas Sosial Kota Padang telah menjalankan perannya sebagai pelaksana dalam penanganan lansia terlantar melalui berbagai kegiatan yang bersifat langsung dan operasional. Peran tersebut diwujudkan melalui proses penerimaan laporan masyarakat, penjangkauan lapangan, assessment awal, pemberian bantuan darurat, mediasi keluarga, hingga penentuan tindak lanjut terhadap kondisi lansia yang ditemukan. Penanganan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah sesaat, tetapi juga bertujuan untuk memastikan bahwa lansia memperoleh perlindungan dan pelayanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kasus lansia terlantar yang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Padang berawal dari laporan masyarakat, aparat kelurahan, kecamatan, Satpol PP, maupun pihak lain yang menemukan lansia dalam kondisi terlantar di ruang publik. Setelah laporan diterima, petugas Dinas Sosial segera melakukan penjangkauan ke lokasi untuk memastikan kondisi lansia serta melakukan identifikasi awal terhadap permasalahan yang dihadapi. Proses ini menjadi sangat penting karena memberikan gambaran langsung mengenai kondisi riil lansia yang meliputi aspek kesehatan, psikologis, ekonomi, dan sosial. Dalam beberapa kasus, petugas menemukan lansia yang hidup menggelandang, tidak memiliki tempat tinggal tetap, mengalami sakit menahun, mengalami gangguan daya ingat, bahkan tidak mengetahui identitas dirinya sendiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlantaran lansia bukan hanya berkaitan dengan kemiskinan, tetapi juga berhubungan dengan berbagai persoalan sosial yang kompleks.

Tabel 1. Bentuk Peran Dinas Sosial Kota Padang dalam penanganan Lansia terlantar

No	Bentuk Peran	Deskripsi
1	Pelaksana	Melakukan penjangkauan dan penanganan langsung di lapangan
2	Asesor	Melakukan identifikasi dan pendataan lansia
3	Fasilitator Administrasi	Mengurus dokumen kependudukan lansia
4	Koordinator	Menghubungkan berbagai instansi terkait
5	Mediator	Mengupayakan pengembalian lansia ke keluarga
6	Penyedia layanan	Memberikan bantuan sosial sesuai kebutuhan
7	Perujuk	Merujuk lansia ke panti sosial
8	Pelindung Sosial	Memberikan perlindungan dari penelantaran
9	Pemantau	Melakukan monitoring pasca-penanganan

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial tidak hanya menjalankan fungsi administratif sebagai lembaga pemerintah, tetapi juga berperan secara langsung dalam memberikan perlindungan sosial kepada kelompok rentan. Kehadiran petugas di lapangan

mencerminkan adanya tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat yang mengalami masalah sosial. Melalui kegiatan penjangkauan, Dinas Sosial berusaha memastikan bahwa lansia yang mengalami keterlantaran tidak dibiarkan menghadapi permasalahannya sendiri, melainkan memperoleh bantuan dan pendampingan yang diperlukan sesuai dengan kondisi yang dialaminya.

Apabila ditinjau dari teori peran yang dikemukakan oleh Willar et al. (2021), peran merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu maupun lembaga sesuai dengan kedudukan dan fungsi yang dimilikinya dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, Dinas Sosial Kota Padang menjalankan perannya sebagai lembaga pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pelaksanaan penjangkauan dan penanganan langsung terhadap lansia terlantar menunjukkan bahwa Dinas Sosial telah menjalankan fungsi kelembagaannya secara nyata melalui tindakan yang langsung menyentuh kelompok sasaran. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Syarbani (2009) yang menjelaskan bahwa peran merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban yang melekat pada suatu status. Dengan demikian, kegiatan penjangkauan yang dilakukan Dinas Sosial merupakan bentuk aktualisasi dari kewajiban institusi dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Gambar 1. Alur penanganan Lansia terlantar oleh Dinas Sosial Kota Padang



Sumber: Dokumentasi Hasil Olahan Peneliti, 2026

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun berbagai bentuk peran telah dijalankan, pelaksanaan penanganan lansia terlantar masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu kendala utama adalah banyaknya lansia terlantar yang berasal dari luar daerah sehingga menyulitkan proses identifikasi dan pengembalian kepada keluarga. Selain itu, rendahnya tanggung jawab keluarga menjadi faktor dominan yang menyebabkan lansia mengalami keterlantaran. Tidak sedikit lansia yang sengaja ditelantarkan oleh keluarganya karena dianggap menjadi beban ekonomi maupun sosial. Kondisi tersebut menunjukkan terjadinya penurunan fungsi keluarga dalam menjalankan tanggung jawab sosial terhadap anggota keluarga yang telah lanjut usia. Di sisi lain, keterbatasan ekonomi keluarga juga menjadi penyebab lansia tidak memperoleh perawatan yang layak.

Selain faktor keluarga, rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kondisi lansia di lingkungan sekitar turut menjadi penghambat dalam proses penanganan. Masyarakat umumnya baru melaporkan keberadaan lansia terlantar ketika kondisi lansia sudah sangat memprihatinkan. Hal ini menyebabkan penanganan sering terlambat dilakukan. Keterbatasan anggaran dan fasilitas pelayanan sosial juga menjadi hambatan yang mempengaruhi efektivitas penanganan lansia terlantar. Berdasarkan hasil wawancara, Dinas

Sosial masih mengalami keterbatasan dalam penyediaan fasilitas khusus bagi lansia dengan kondisi ketergantungan tinggi, seperti lansia dengan disabilitas berat, kepikunan, maupun kondisi sakit kronis yang membutuhkan perawatan intensif. Selain itu, faktor internal lansia seperti kepikunan, penurunan daya ingat, gangguan komunikasi, serta kondisi psikologis juga menjadi kendala dalam proses identifikasi dan pendataan. Banyak lansia yang tidak mampu mengingat identitas maupun alamat keluarganya sehingga memperlambat proses penanganan dan reunifikasi keluarga.

Permasalahan lansia terlantar merupakan salah satu persoalan sosial yang semakin kompleks seiring meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan proses biologis akibat penuaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta perubahan struktur keluarga dalam masyarakat modern. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa lansia terlantar di Kota Padang sebagian besar berada dalam kondisi rentan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Banyak lansia yang tidak lagi memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri sehingga membutuhkan dukungan dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Padang telah menjalankan berbagai bentuk peran dalam penanganan lansia terlantar. Peran tersebut meliputi fungsi sebagai pelaksana, pengidentifikasi dan pendata (asesor), fasilitator administrasi, koordinator lintas sektor, mediator reunifikasi keluarga, penyedia layanan sosial, perujuk ke panti sosial, pelindung sosial, serta pemantau dan evaluator. Berbagai bentuk peran tersebut menunjukkan bahwa Dinas Sosial memiliki tanggung jawab yang luas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan.

Dalam perspektif teori peran, suatu lembaga dikatakan menjalankan perannya apabila mampu melaksanakan hak, kewajiban, serta tanggung jawab sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya dalam struktur sosial. Dinas Sosial sebagai lembaga pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam menangani berbagai permasalahan sosial, termasuk lansia terlantar. Oleh karena itu, keberhasilan penanganan lansia terlantar sangat dipengaruhi oleh kemampuan Dinas Sosial dalam menjalankan fungsi-fungsi kelembagaan secara optimal.

Peran sebagai pelaksana terlihat melalui kegiatan penjangkauan langsung terhadap lansia terlantar di lapangan. Penjangkauan dilakukan ketika Dinas Sosial menerima laporan dari masyarakat, aparat kelurahan, Satpol PP, maupun instansi lain terkait keberadaan lansia terlantar di ruang publik. Penjangkauan menjadi tahapan awal yang sangat penting karena melalui proses tersebut petugas dapat mengetahui kondisi nyata lansia secara langsung. Dalam beberapa kasus, lansia ditemukan dalam kondisi sakit, tidak memiliki tempat tinggal, mengalami gangguan kesehatan mental, maupun hidup menggelandang di tempat umum.

Gambar 2. Pengantaran lansia ke panti lansia bersama keluarga dan Dinas Sosial



Sumber: Dinas Sosial Kota Padang

Kegiatan penjangkauan menunjukkan bahwa Dinas Sosial tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga hadir secara langsung di tengah masyarakat dalam menangani persoalan sosial. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penanganan yang dilakukan masih bersifat reaktif karena bergantung pada laporan masyarakat. Artinya, Dinas Sosial baru melakukan tindakan ketika memperoleh informasi dari pihak lain. Kondisi ini menyebabkan masih adanya lansia terlantar yang tidak terdeteksi secara dini sehingga penanganan sering terlambat dilakukan.

Selain sebagai pelaksana, Dinas Sosial juga menjalankan fungsi sebagai asesor melalui kegiatan assessment atau identifikasi kondisi lansia. Assessment dilakukan untuk mengetahui identitas, kondisi kesehatan, latar belakang sosial ekonomi, kondisi psikologis, serta keberadaan keluarga lansia. Tahapan assessment sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan bentuk penanganan yang tepat. Lansia yang masih memiliki keluarga akan diupayakan untuk dikembalikan kepada pihak keluarga, sedangkan lansia yang tidak memiliki keluarga atau berada dalam kondisi ketergantungan tinggi akan dirujuk ke panti sosial.

Gambar 3. Asesment lansia oleh dinas sosial



Sumber: Dokumentasi Dinas Sosial Kota Padang

Dalam praktiknya, proses assessment sering menghadapi berbagai hambatan, terutama pada lansia yang mengalami kepikunan atau gangguan daya ingat. Banyak lansia yang tidak mampu mengingat identitas pribadi, alamat rumah, maupun keberadaan keluarganya. Kondisi tersebut menyulitkan petugas dalam melakukan pendataan serta memperlambat proses penanganan. Selain itu, terdapat pula lansia yang mengalami gangguan komunikasi sehingga membutuhkan pendekatan khusus dalam proses wawancara dan identifikasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Dinas Sosial berperan sebagai fasilitator administrasi bagi lansia terlantar. Banyak lansia yang ditemukan tidak memiliki dokumen kependudukan seperti KTP, kartu keluarga, maupun identitas lainnya. Ketiadaan dokumen administrasi menyebabkan lansia kesulitan memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan, bantuan sosial, maupun program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, Dinas Sosial membantu proses pengurusan administrasi kependudukan agar lansia dapat memperoleh hak-haknya sebagai warga negara.

Peran sebagai fasilitator administrasi memperlihatkan bahwa penanganan lansia terlantar tidak hanya berkaitan dengan bantuan fisik atau ekonomi, tetapi juga mencakup pemenuhan hak sipil dan sosial lansia. Identitas kependudukan menjadi aspek penting dalam sistem pelayanan sosial karena menjadi syarat utama dalam memperoleh berbagai bentuk bantuan dan pelayanan publik. Selanjutnya, Dinas Sosial juga menjalankan fungsi sebagai koordinator lintas sektor dalam penanganan lansia terlantar. Penanganan lansia tidak dapat dilakukan hanya oleh satu instansi karena permasalahan yang dihadapi bersifat multidimensional. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti kelurahan, kecamatan, tenaga kesehatan, rumah sakit, Satpol PP, PSM, dan panti sosial. Koordinasi lintas sektor dilakukan agar proses penanganan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan lansia.

Meskipun koordinasi lintas sektor telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat kendala komunikasi dan keterlambatan koordinasi antarinstitusi yang menyebabkan proses penanganan menjadi lambat. Selain itu, belum adanya sistem data terpadu menyebabkan proses pendataan lansia terlantar sering mengalami kendala, terutama dalam pencarian identitas dan riwayat keluarga lansia.

Dalam proses penanganan, Dinas Sosial juga menjalankan fungsi sebagai mediator melalui upaya reunifikasi keluarga. Reunifikasi keluarga dilakukan dengan tujuan mengembalikan lansia kepada keluarga apabila masih terdapat anggota keluarga yang dapat bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Upaya ini dilakukan karena keluarga merupakan lingkungan sosial utama yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam merawat lansia.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua keluarga bersedia menerima kembali lansia. Beberapa keluarga menolak dengan alasan keterbatasan ekonomi, konflik keluarga, maupun ketidakmampuan merawat lansia yang sakit atau mengalami ketergantungan tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan nilai sosial dalam keluarga yang berdampak pada melemahnya fungsi keluarga dalam merawat orang tua lanjut usia. Fenomena tersebut juga menunjukkan bahwa keterlantaran lansia bukan hanya disebabkan oleh kemiskinan, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan pola hubungan sosial dalam keluarga. Modernisasi dan tuntutan ekonomi menyebabkan hubungan antaranggota keluarga menjadi semakin longgar. Dalam beberapa kasus, lansia dianggap sebagai beban sehingga keberadaannya kurang diperhatikan oleh keluarga.

Selain sebagai mediator, Dinas Sosial juga menjalankan fungsi sebagai penyedia layanan sosial. Pelayanan yang diberikan meliputi bantuan kebutuhan dasar, pelayanan

kesehatan, bantuan sosial, hingga rujukan ke panti sosial. Bantuan tersebut diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lansia. Lansia yang masih dapat hidup mandiri biasanya memperoleh bantuan sosial dan pemantauan, sedangkan lansia dengan kondisi fisik lemah atau sakit berat akan dirujuk ke fasilitas pelayanan sosial.

Peran sebagai perujuk menjadi sangat penting karena tidak semua lansia dapat ditangani di lingkungan keluarga. Lansia dengan kondisi disabilitas berat, sakit kronis, atau gangguan mental memerlukan pelayanan yang lebih intensif dan profesional. Dalam kondisi demikian, Dinas Sosial akan merujuk lansia ke panti sosial atau fasilitas pelayanan lain yang dianggap mampu memberikan perawatan lebih baik. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan sosial bagi lansia di Kota Padang masih memiliki keterbatasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan PSM dan pihak terkait, masih diperlukan panti sosial khusus bagi lansia terlantar yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Kebutuhan tersebut muncul karena masih banyak lansia dengan kondisi ketergantungan tinggi yang belum dapat tertangani secara optimal oleh fasilitas yang tersedia saat ini.

Keberadaan panti sosial khusus lansia dianggap penting karena sebagian lansia memerlukan pelayanan yang bersifat intensif dan berkelanjutan. Lansia dengan kondisi kepikunan, lumpuh, atau sakit berat membutuhkan pengawasan dan perawatan khusus yang sulit dilakukan apabila hanya mengandalkan keluarga. Oleh karena itu, pengembangan fasilitas pelayanan sosial menjadi salah satu kebutuhan mendesak dalam penanganan lansia terlantar di Kota Padang.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor penghambat dalam penanganan lansia terlantar berasal dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal. Salah satu faktor utama adalah banyaknya lansia terlantar yang berasal dari luar daerah. Kondisi ini menyulitkan proses identifikasi dan reunifikasi keluarga karena keterbatasan data serta jauhnya wilayah asal lansia. Selain itu, rendahnya tanggung jawab keluarga menjadi faktor dominan yang menyebabkan lansia mengalami keterlantaran. Banyak keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup lansia karena kondisi ekonomi yang rendah. Namun, terdapat pula keluarga yang sebenarnya mampu secara ekonomi tetapi kurang memiliki kepedulian terhadap lansia.

Rendahnya kepedulian masyarakat juga menjadi hambatan dalam penanganan lansia terlantar. Masyarakat sering kali kurang peduli terhadap kondisi lansia di lingkungan sekitar sehingga keberadaan lansia terlantar baru diketahui ketika kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Padahal, masyarakat memiliki peran penting sebagai lingkungan sosial terdekat yang dapat membantu mendeteksi dan melaporkan keberadaan lansia terlantar secara lebih cepat. Keterbatasan anggaran juga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pelayanan sosial bagi lansia. Anggaran yang terbatas menyebabkan Dinas Sosial mengalami kendala dalam menyediakan fasilitas pelayanan, meningkatkan frekuensi pemantauan, serta memperluas jangkauan program penanganan lansia terlantar. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan tidak hanya bergantung pada pelaksanaan peran lembaga, tetapi juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya pendukung.

Dalam perspektif teori penuaan, lansia mengalami berbagai penurunan fungsi biologis, psikologis, dan sosial yang menyebabkan ketergantungan terhadap orang lain semakin meningkat. Penurunan kemampuan fisik dan kognitif menyebabkan lansia memerlukan dukungan sosial yang lebih besar dibandingkan kelompok usia lainnya. Oleh karena itu, keberadaan keluarga, masyarakat, dan pemerintah menjadi sangat penting dalam menjaga kesejahteraan lansia. Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa penanganan lansia terlantar memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Penanganan tidak dapat hanya berfokus pada pemberian bantuan sementara, tetapi juga

harus mencakup upaya pencegahan keterlantaran melalui penguatan fungsi keluarga, peningkatan kepedulian masyarakat, serta pengembangan sistem pelayanan sosial yang lebih proaktif.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini memperkuat temuan bahwa penanganan lansia terlantar membutuhkan kerja sama lintas sektor dan keterlibatan berbagai pihak. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menyoroti pentingnya pengembangan fasilitas khusus bagi lansia dengan ketergantungan tinggi serta perlunya sistem kerja yang lebih proaktif dalam mendeteksi keberadaan lansia terlantar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Padang telah menjalankan perannya dalam penanganan lansia terlantar melalui berbagai fungsi, yaitu sebagai pelaksana, pengidentifikasi dan pendata, fasilitator administrasi, koordinator lintas sektor, mediator, penyedia layanan sosial, perujuk, pelindung sosial, serta pemantau evaluator. Peran tersebut menunjukkan adanya keterlibatan aktif dan system kerja yang cukup terstruktur dalam menangani permasalahan lansia terlantar di lapangan. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih cenderung bersifat reaktif, terbatasnya system pemantauan, serta belum maksimalnya koordinasi lintas sektor.

Selain itu, terdapat berbagai faktor pengahambat yang mempengaruhi efektivitas penanganan, di antaranya banyaknya lansia dari luar daerah, rendahnya tanggung jawab keluarga, rendahnya kepedulian masyarakat, keterbatasan anggaran, kondisi internal lansia seperti kepikunan, serta faktor sosial dan ekonomi. hal ini menunjukkan bahwa permasalahan lansia terlanatar berisfat kompleks dan multidimensional, sehingga memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penanganan lansia terlanatar tidak hanya bergantung pada peran Dinas Sosial, tetapi juga memerlukan dukungan dari keluarga, masyarakat, serta kebijakan pemerintah yang lebih kuat dan terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem penanganan yang lebih proaktif, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pengembangan fasilitas dan program yang lebih inklusif. Implikasi dari penelitian ini membuka peluang untuk penelitian selanjutnya yang dapat mengkaji model penanganan lansia terlantar berbasis komunitas serta pendekatan yang lebih integratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024*. Jakarta: BPS.
- Nugroho, W. (2008). *Keperawatan gerontik dan geriatrik*. Jakarta: EGC.
- Nugroho, W., & Abikusno, N. (2013). *Kesehatan dan Keperawatan Lansia*. Jakarta: Salemba Medika.
- Rahmadani, R., Sabrina, S., & Matnuh, H. (2016). *Peran Dinas Sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(2), 945–952.
- Rijanta, R., dkk. (2022). *Dinamika kependudukan dan penuaan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Syarbani, A. (2009). *Sosiologi dan perubahan sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang *Kesejahteraan Lanjut Usia*. (1998). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Willar, F., dkk. (2021). Peran Lembaga Sosial dalam Penanganan Permasalahan Sosial Masyarakat. *Jurnal Sosial Humaniora*, 14(2), 120–128.